

IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR FILOSOFIS SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA

Rita Mulyati¹, Wahida Rahma², Entus Edo Bregiansah³, Danti Dahlia⁴,
Ahmad Suryadi⁵, Muhammad Misbakul Munir⁶

¹⁻⁶Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

¹ritajingga2323@gmail.com, ²wahidarahma077@gmail.com,

³anugagah@gmail.com, ⁴dantidahlia83@gmail.com, ⁵ahmad.suryadi@umj.ac.id,

⁶m.misbakul@umj.ac.id

ABSTRACT

As the philosophical foundation of Indonesia, Pancasila comprises five core principles that have a significant impact on the country's education system. These principles govern the development, implementation, and evaluation of the curriculum, reflecting the nation's educational goals and expected outcomes for students. This article analyzes the philosophical foundations of Pancasila, focusing on the content and graduate competency standards, their relationship to educational goals, and their impact on the national curriculum. By applying a literature review, this research focuses on the significance of Pancasila in guiding curriculum development and teaching methodologies in Indonesia. The results indicate that Pancasila serves as the primary philosophical reference for the Indonesian education system, particularly in terms of character development, tolerance, citizenship education, and inclusive teaching practices. This research also investigates the development of content and graduate competency standards in the Indonesian education system, taking into account changes in government policy and the philosophical principles of Pancasila. However, further study is needed to examine how these philosophical principles influence other educational criteria.

Keywords: *curriculum development, philosophical assumption, Pancasila, content standards, graduate competency standards.*

ABSTRAK

Sebagai dasar filosofis di Indonesia, Pancasila terdiri dari lima sila utama yang memiliki dampak besar terhadap sistem pendidikan di negara ini. Sila-sila tersebut mengatur proses pengembangan, penerapan, dan evaluasi kurikulum, yang mencerminkan sasaran pendidikan bangsa dan hasil yang diharapkan dari para siswa. Artikel ini menganalisis dasar-dasar filosofi Pancasila, dengan sorotan pada isi dan standar kompetensi lulusan, keterkaitannya dengan tujuan pendidikan, serta dampaknya terhadap kurikulum nasional. Dengan menerapkan studi literatur, penelitian ini difokuskan pada signifikansi Pancasila dalam memandu pengembangan kurikulum dan metodologi pengajaran di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila berperan sebagai acuan filosofis utama bagi sistem pendidikan di Indonesia, khususnya dalam hal pengembangan karakter, toleransi, pendidikan kewarganegaraan, serta praktik pengajaran yang inklusif. Penelitian ini juga menyelidiki perkembangan standar isi dan standar kompetensi lulusan dalam sistem pendidikan di Indonesia, dengan memperhatikan perubahan dalam kebijakan pemerintah dan sila-sila filosofis Pancasila. Meskipun demikian, studi lebih lanjut diperlukan untuk

meneliti bagaimana prinsip-prinsip filosofis ini berpengaruh terhadap kriteria pendidikan lainnya.

Kata kunci: pengembangan kurikulum, asumsi filosofis, Pancasila, standar isi, standar kompetensi lulusan.

A. Pendahuluan

Dalam konteks desain kurikulum di Indonesia, keyakinan filosofis memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan pendidikan. Keyakinan ini berakar pada cita-cita dan nilai-nilai dasar yang membimbing penciptaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Hal ini sejalan dengan aspirasi negara untuk kualitas pendidikan yang tinggi dan hasil yang diharapkan bagi para pembelajarnya. Ornstein dan Hunkins (2018) mengamati bahwa proses pengembangan kurikulum terus berubah. Proses ini menggabungkan wawasan baru dari pemikiran modern dan postmodern, bersama dengan temuan terbaru dalam studi kognitif, anatomi dan fungsi otak, yang terintegrasi dengan desain instruksional dan teori sistem. Selain itu, berbagai filosofi dan perspektif pendidikan memengaruhi jalur pengembangan kurikulum. Terdapat banyak metode untuk pengembangan kurikulum, masing-masing menganalisis topik, pembelajar, dan

faktor masyarakat dari sudut pandang yang berbeda.

Proses pengembangan kurikulum mencakup berbagai prosedur yang terorganisir, etis, dan inovatif yang meningkatkan tujuan pendidikan bagi siswa dan lembaga. Idealnya, pembuatan kurikulum harus melibatkan semua pihak yang mungkin terkena dampaknya. Filsafat sangat penting dalam pengembangan kurikulum karena merupakan faktor kunci dalam membentuk kerangka pendidikan dalam sistem Indonesia. Selain itu, filsafat sangat penting untuk menentukan landasan pendidikan yang membentuk pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang dimasukkan ke dalam kurikulum (Juanda 2022).

Dengan memahami nilai-nilai yang menjadi pedoman masyarakat dan lembaga pendidikan, para ahli dapat merancang kurikulum yang selaras dengan kebutuhan dan tujuan masyarakat. Penetapan tujuan pendidikan, pengembangan program, pemilihan metode pengajaran, dan peran guru dan peserta didik harus

secara konsisten mencerminkan prinsip-prinsip filosofis Indonesia, khususnya Pancasila.

Filosofi dasar Indonesia, yang disebut Pancasila, terdiri dari lima sila fundamental (Firgiawan, Sidik, dan Nugrah 2023). Sistem pendidikan terstruktur untuk membina individu yang berintegritas moral, bertanggung jawab secara sosial, dan berwawasan budaya, selaras dengan prinsip-prinsip fundamental ini (Kilag dkk. 2023; Mulang dan Putra 2023). Meskipun demikian, terdapat hambatan yang perlu diperhatikan dalam kemajuan kurikulum pendidikan Indonesia, terlepas dari pentingnya prinsip-prinsip filosofis ini. Pertama, tantangan implementasi muncul ketika filosofi yang mendasarinya gagal terwujud secara efektif dalam pengalaman di kelas (Meliani dkk. 2022; Ahmed dkk. 2022). Selain itu, konteks budaya dan geografis Indonesia yang beragam mempersulit pengembangan kurikulum yang secara memadai mewakili realitas lokal (Fath dkk. 2023; Suryapermana dkk. 2023). Lebih lanjut, meskipun cita-cita filosofis tersebut mendorong persatuan di tengah keberagaman, penerapannya di dunia nyata dapat mengabaikan perbedaan sumber

daya, peluang, dan prestasi pendidikan di berbagai wilayah dan komunitas (Alam dan Mohanty 2023; Levinson, Geron, dan Brighthouse 2022).

Selain itu, kurikulum mungkin kurang memadai dalam mempersiapkan siswa untuk memenuhi tuntutan masyarakat global (Dako-Gyeke dkk. 2023; Mahmud dan Wong 2022). Ditambah lagi, kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang pesat menuntut kurikulum yang fleksibel dan kreatif (Munir dkk. 2022; Purwanto, Hartono, dan Wahyuni 2023). Mungkin juga terdapat kesenjangan dalam menilai perkembangan holistik siswa, yang seharusnya mencakup keterampilan moral dan sosial di samping kemampuan kognitif (Kioupi dan Voulvoulis 2022; Wilson dkk. 2023). Terakhir, kesempatan pengembangan profesional dan pelatihan bagi guru mungkin kurang, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengintegrasikan

Artikel ini meneliti Pancasila sebagai dasar filosofi yang diterapkan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia, khususnya terkait dengan standar isi dan standar kompetensi lulusan yang terus mengalami

perubahan dan beroperasi di tingkat nasional, serta bagaimana hal ini berkaitan dengan tujuan pendidikan Indonesia dan dampaknya terhadap kurikulum nasional.

B. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode studi literatur untuk mengidentifikasi kata kunci penelitian, perbandingan, dan hasil dari berbagai studi yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal terkemuka yang diranking oleh Scimago, di samping beberapa teks referensi dan materi tambahan seperti dokumen peraturan atau peraturan pemerintah.

Tujuannya adalah untuk merumuskan kesimpulan tentang Pancasila sebagai filosofi dasar yang membimbing pengembangan kurikulum pendidikan Indonesia. Tinjauan terstruktur yang dilakukan dalam studi ini terdiri dari empat fase. Fase pertama melibatkan penetapan tujuan penelitian melalui strategi pemilihan kata kunci, landasan filosofis, dan integrasi pengembangan kurikulum Indonesia. Fase kedua mencakup penelusuran pustaka melalui evaluasi jurnal individual. Selama fase ini, lebih dari 60 artikel diperiksa untuk menilai konsistensi

literatur yang relevan. Fase ketiga melibatkan pencarian basis data sistematis menggunakan SEforRA, yaitu mesin pencari untuk makalah penelitian yang diindeks dan diranking oleh Scopus. Selain itu, pencarian kata kunci dilakukan dengan Google Scholar, ScienceDirect, ERIC, dan mesin pencari perpustakaan online Wiley. Fase ini mencakup pemilihan artikel jurnal melalui tinjauan judul dan abstrak, pengarsipan teks lengkap, evaluasi kualitas jurnal, dan ekstraksi data. Fase keempat difokuskan pada analisis dan sintesis temuan dari semua jurnal untuk memenuhi tujuan penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Landasan filosofis sangat penting dalam memengaruhi tujuan pendidikan di Indonesia. Filsafat hidup negara merupakan elemen kunci dalam membangun kerangka tujuan pendidikan di tingkat nasional. Terutama, Tim Pengembangan MKDP (2018) telah menekankan pentingnya perspektif filosofis dalam pendidikan, khususnya dalam menentukan tujuan dan sasarannya. Hal ini karena filsafat pendidikan dapat memberikan solusi terhadap berbagai tantangan yang

dihadapi di sektor pendidikan. Menurut Nasution, dalam Tim Pengembangan MKDP (2018), terdapat setidaknya lima indikator yang menggambarkan keuntungan filsafat dalam pendidikan. Pertama, filsafat pendidikan berfungsi sebagai kompas untuk membimbing sistem pendidikan (Tesar dkk. 2022; Karsono dkk. 2022). Hal ini menunjukkan bahwa filsafat pendidikan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang arah pendidikan yang dimaksudkan untuk diterapkan secara nasional. Kedua, filsafat pendidikan membantu memperjelas hasil yang harus dicapai oleh tujuan pendidikan nasional (Dung dan Pham 2022). Ketiga, filsafat pendidikan dan tujuannya merupakan inti dari setiap pendekatan pendidikan yang diadopsi (Alam 2022; Naim, Aziz, dan Teguh 2022). Keempat, tujuan pendidikan memungkinkan pendidik untuk mengevaluasi upaya mereka hingga tujuan tersebut tercapai (Richlin 2023; Adiyono, Rahmat, dan Munawarroh 2022). Terakhir, tujuan pendidikan menginspirasi motivasi untuk melakukan inisiatif pendidikan (Herwin, Nurhayati, dan Dahalan 2022; Mundir dkk. 2022).

Dengan mempertimbangkan kelima manfaat yang diuraikan tersebut, menjadi jelas bahwa filsafat sangat mendasar dalam pendidikan. Filsafat tidak hanya berkontribusi pada penciptaan tujuan pendidikan tetapi juga berdampak pada hasil yang diharapkan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pengembangan kurikulum di Indonesia, keyakinan filosofis secara signifikan memengaruhi pembentukan kerangka pendidikan. Keyakinan ini berlandaskan pada nilai-nilai inti, prinsip-prinsip, dan asumsi yang mengarahkan desain, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Keyakinan ini menandakan aspirasi pendidikan bangsa dan hasil yang diharapkan bagi peserta didik.

Ada lima faktor yang mendukung gagasan ini. Pertama, filosofi dasar Indonesia didasarkan pada Pancasila, yang mencakup lima prinsip utama. Prinsip-prinsip ini membentuk sistem pendidikan Indonesia, memastikan bahwa sistem tersebut berkontribusi secara efektif terhadap pertumbuhan individu yang beretika, sadar sosial, dan peka terhadap perbedaan budaya (Akbar dkk. 2022; Mulang dan Putra 2023). Sebagai bangsa yang kaya akan beragam latar belakang budaya,

etnis, dan agama, kurikulum nasional Indonesia harus mempromosikan persatuan nasional dan kebanggaan akan warisan Indonesia sekaligus menumbuhkan rasa hormat terhadap lanskap budaya negara yang beragam. Kurikulum dirancang untuk memfasilitasi perkembangan komprehensif, meliputi pertumbuhan intelektual, emosional, sosial, dan fisik, bertujuan untuk menciptakan individu yang berwawasan luas yang dapat berpikir kritis, mengekspresikan kreativitas mereka, dan memenuhi peran mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab (Ayudia dkk. 2023).

Selain itu, kurikulum harus mengakui hubungan global antar negara dan mencakup sudut pandang dunia sebagai bekal keterampilan siswa untuk berkembang di lingkungan yang semakin saling terhubung. Terakhir, filosofi pendidikan menekankan gagasan bahwa pembelajaran adalah sebuah perjalanan yang berkelanjutan (Hadi 2022; Mugambi dan Chepkonga 2022). Kerangka pendidikan harus berfokus pada memupuk semangat untuk pengetahuan, fleksibilitas, dan pengembangan berkelanjutan, sehingga mempersiapkan siswa untuk

menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh situasi global yang berubah dengan cepat.

1. Asumsi Filosofis di Balik Standar Nasional Kurikulum Indonesia

Filsafat memiliki pengaruh penting dalam bagaimana tujuan pendidikan nasional dirancang dan diwujudkan. Filsafat meletakkan prinsip dan keyakinan dasar yang mengarahkan perencanaan, pelaksanaan, dan evolusi kurikulum secara bijaksana, beralasan, dan metodis. Filsafat merupakan inti dari desain kurikulum, yang membimbing berbagai aspek seperti pengetahuan tentang alam, isu-isu sosial, konteks budaya, kebutuhan individu, dan teori pendidikan (Tohri dkk. 2022; Hadi 2022; Balogun 2023). Dari fondasi ini, beberapa komponen atau kerangka kerja utama ditetapkan untuk membentuk arah kurikulum, termasuk tujuan pendidikan nasional, tujuan untuk unit pendidikan, dan target pembelajaran spesifik. Seperti yang dicatat oleh Sadiyah dan Wiranegara (2023), tujuan pendidikan nasional utama harus didefinisikan dengan jelas, diikuti dengan penggabungan nilai-nilai berbasis Pancasila secara eksplisit dan implisit.

Di Indonesia, proses pengembangan kurikulum sangat erat kaitannya dengan Pancasila, kerangka filosofis utama negara yang mendasari visi masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai etika (Rusman 2019; Tim Pengembang Kurikulum 2018). Metode pembuatan kurikulum ini berfokus pada perspektif pendidikan holistik, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan intelektual siswa, pengembangan karakter, dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Penyertaan motto nasional "*Bhineka Tunggal Ika*" dalam pengembangan kurikulum menekankan keberagaman budaya, etnis, dan agama Indonesia, serta menumbuhkan rasa hormat dan pengertian di antara berbagai kelompok masyarakat. Melalui penekanan pada pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kemampuan kreatif, kurikulum bertujuan untuk membentuk individu yang berwawasan luas dan mampu menjadi warga yang terlibat dan berpengetahuan dalam masyarakat. Pada akhirnya, proses pengembangan kurikulum di Indonesia berupaya untuk menumbuhkan generasi baru pemikir

yang dilengkapi dengan pengetahuan dan nilai-nilai etika, meletakkan dasar bagi bangsa yang adil, damai, dan sejahtera. Standar pendidikan nasional sangat penting untuk membentuk landasan filosofis dalam kurikulum, yang ditentukan dalam standar isi (Cameron dan Boyles 2022; Setiawan dan Suwandi 2022). Standar pendidikan ini berfungsi untuk mengevaluasi dan menjaga kualitas pendidikan. Standar tersebut mencakup berbagai bidang, termasuk kurikulum, metode pengajaran, penelitian, lembaga pendidikan, dan tenaga pengajar. Tujuan utama dari standar pendidikan ini adalah untuk memastikan bahwa sistem dan lembaga penyedia pendidikan berkualitas tinggi dan bermanfaat bagi peserta didik (Helda dan Syahrani 2022).

Seperangkat prinsip atau kriteria yang digunakan untuk menilai dan menentukan kualitas pendidikan dikenal sebagai standar pendidikan. Kriteria ini dapat berkaitan dengan aspek-aspek seperti kurikulum, metode pengajaran, penelitian, lembaga pendidikan, dan pendidik. Tujuan utama dari standar pendidikan adalah untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan oleh

lembaga atau sistem mencapai tingkat kualitas tertentu dan menawarkan sumber daya terbaik kepada siswa (Anggraena dkk. 2022). Standar pendidikan memainkan peran penting dalam pengembangan kurikulum negara karena beberapa alasan (Tomlinson dkk. 2023). Pertama-tama, standar pendidikan membantu mengevaluasi kualitas pendidikan dengan menetapkan standar untuk keberhasilan akademik. Dengan menggunakan tolok ukur ini, suatu negara dapat mengukur seberapa baik sistem pendidikannya membantu siswa dalam memenuhi kriteria yang diperlukan untuk mencapai tingkat tertentu (Shabbazova Abduhalimova, dan Abdunazarova 2022; Simanjuntak dkk. 2022). Selain itu, standar pendidikan membantu dalam menyusun kurikulum dengan menguraikan tujuan pembelajaran, keterampilan, dan pengetahuan yang harus diperoleh siswa (González-Pérez dan Ramírez 2022). Standar ini mengarahkan lembaga pendidikan tentang apa yang harus dipelajari siswa dan kemampuan apa yang harus mereka kembangkan. Lebih lanjut, standar pendidikan membimbing guru dalam perancangan dan implementasi

program pendidikan (Pratikno, Hermawan, dan Arifin 2022; Subramaniam, Karpudewan, dan Roth 2023). Ketika pendidik memahami standar yang telah ditetapkan, mereka dapat secara efektif mengarahkan pengalaman belajar berdasarkan hasil yang diinginkan. Selain itu, dengan menstandarisasi harapan bagi semua siswa, terlepas dari keadaan mereka, standar pendidikan dapat mendorong keadilan dalam pendidikan di seluruh negeri (Alam dan Mohanty 2023; Sibanda 2023). Hal ini dapat menumbuhkan suasana pendidikan yang lebih adil dan inklusif. Terakhir, standar pendidikan meningkatkan akuntabilitas lembaga pendidikan dan pemerintah dalam mencapai tujuan pendidikan (Hidayah dan Syahrani 2022; Nurhayati dan Marsidin 2022). Dengan mengevaluasi kinerja terhadap standar ini, administrator dapat melacak dan menilai efektivitas sistem pendidikan. Dengan mengenali dan menerapkan standar pendidikan, suatu negara dapat membantu memastikan sistem pendidikannya tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas, lingkungan belajar inklusif, dan memberikan bekal siswa dalam tantangan sosial dan persaingan mencari pekerjaan.

a. Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 19/2005

1) Standar Isi

Standar isi adalah pedoman yang menentukan cakupan isi dan kemampuan yang dibutuhkan siswa untuk mencapai berbagai tahapan pendidikan. Standar ini mencakup kompetensi yang berkaitan dengan kelulusan, kecukupan materi pembelajaran, mata pelajaran tertentu, dan silabus pembelajaran secara keseluruhan. Standar ini menetapkan kerangka dasar dan organisasi kurikulum, jumlah pembelajaran yang diharapkan, Kurikulum untuk Unit Pendidikan di berbagai tingkatan, serta kriteria akademik dan pendidikan.

2) Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan mengacu pada tolok ukur kualifikasi lulusan, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan mereka.

b. Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 13/2015

1) Standar Isi

Kriteria untuk mencapai kemahiran tingkat pascasarjana pada level dan bentuk

pendidikan tertentu dikenal sebagai standar isi.

2) Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan mengacu pada tolok ukur yang mendefinisikan kualifikasi yang terkait dengan kemampuan lulusan, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan mereka.

c. Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 57/2021

1) Standar Isi

Standar isi mendefinisikan persyaratan dasar yang menguraikan berbagai mata pelajaran yang dibutuhkan untuk memastikan siswa mencapai kemahiran dalam jalur, tingkat, dan kategori pendidikan tertentu.

2) Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan merupakan tolok ukur dasar mengenai integrasi nilai-nilai, kemampuan, dan pengetahuan yang mencerminkan pencapaian tujuan pendidikan siswa setelah menyelesaikan studi mereka.

Pasal 6:

- i. Standar kompetensi bagi lulusan program pendidikan dasar memprioritaskan

pertumbuhan karakter berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca, menulis, dan matematika.

- ii. Dalam program pendidikan menengah umum, standar kompetensi bagi lulusan menyoroti pentingnya pengetahuan yang memungkinkan siswa untuk mandiri dan melanjutkan pendidikan lebih lanjut.
- iii. Standar kompetensi bagi lulusan program pendidikan menengah kejuruan diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan yang mendukung siswa dalam menjadi mandiri dan memajukan pendidikan mereka dengan cara yang berkaitan dengan bidang profesional mereka.

Dalam pendidikan tinggi, standar kelulusan dirancang untuk membekali mahasiswa agar menjadi warga yang bertanggung jawab. Kriteria ini memperkuat karakter moral yang kokoh serta memberikan pengetahuan, kemampuan,

kemandirian, dan sudut pandang yang diperlukan untuk mengeksplorasi, menciptakan, dan memanfaatkan ilmu, seni, juga teknologi demi kesejahteraan masyarakat.

d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4/2022

Ketentuan dalam paragraf 21 Pasal 5 telah direvisi menjadi: Harapan kompetensi bagi individu yang lulus dari program pendidikan anak usia dini menetapkan tolok ukur untuk mencapai perkembangan anak usia dini. Tolok ukur yang disebutkan dalam paragraf (1) menekankan berbagai aspek pertumbuhan anak, termasuk:

- 1) nilai-nilai spiritual dan etika;
- 2) prinsip-prinsip Pancasila;
- 3) keterampilan fisik dan motorik;
- 4) kemampuan kognitif;
- 5) keterampilan berbahasa; dan
- 6) perkembangan sosial dan emosional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi beberapa penyesuaian baik dalam isi maupun standar kompetensi lulusan terkait kurikulum nasional Indonesia (Setiawan dan Suwandi 2022). Berbagai faktor dapat

menyebabkan modifikasi dalam kurikulum nasional ini. Awalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 menetapkan bahwa standar isi mendefinisikan mata pelajaran apa yang harus dicakup dan apa yang diharapkan dari siswa dalam hal kompetensi, yang menjadi dasar pengembangan kurikulum, beban mata kuliah, dan jadwal akademik di tingkat Unit Pendidikan (Hikmah 2022; Rifai dan Rombot 2023). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 dan 57 Tahun 2021 menetapkan standar isi sebagai kriteria penting untuk memenuhi kompetensi lulusan melalui jalur pendidikan, tingkatan, dan format tertentu. Lebih jauh lagi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tidak memperkenalkan pedoman baru mengenai standar isi kurikulum nasional (Djafar dkk. 2023), menunjukkan bahwa standar ini tetap tidak berubah dari peraturan sebelumnya. Kedua, klausul dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 dan No. 13 Tahun 2015 mengenai Standar Kompetensi Lulusan konsisten. Peraturan ini mengkategorikan standar kompetensi sebagai alat untuk mengevaluasi kemampuan lulusan, yang meliputi

sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Nurdin dkk. 2023). Selain itu, standar kompetensi lulusan telah mengalami revisi signifikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 dan No. 4 Tahun 2022. Dalam hal ini, standar kompetensi lulusan yang didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 menetapkan tolok ukur penting untuk sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa (Daniati 2022; Santika dkk. 2022). Standar ini berasal dari tujuan pendidikan nasional, tahapan perkembangan siswa, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan berbagai format pendidikan. Standar ini menyoroti pentingnya pengembangan karakter, kemampuan literasi dan numerasi, pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan tinggi. Dengan memupuk integritas, pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan minat yang besar dalam mengeksplorasi, memajukan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermakna, pemerintah berupaya mempersiapkan siswa untuk peran mereka di masyarakat (Martinez 2022; Pham dan Sampson 2022).

Selain itu, Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 telah direvisi untuk memperjelas standar kompetensi bagi lulusan pendidikan anak usia dini. Standar ini menekankan elemen-elemen kunci perkembangan anak, seperti nilai-nilai etika dan spiritual, prinsip-prinsip Pancasila, koordinasi tubuh, pertumbuhan kognitif, perkembangan bahasa, dan keterampilan sosial-emosional (Rosalianisa, Purwoko, dan Nurchayati 2023). Pasal 6 sekarang mendefinisikan standar kompetensi bagi lulusan dari Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah Umum, Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan, dan Universitas (Sapdi dkk. 2022). Tujuan dari standar-standar ini adalah untuk membekali siswa agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, menumbuhkan sifat-sifat karakter yang mewujudkan nilai-nilai Pancasila, dan meningkatkan pemahaman, keterampilan, otonomi, dan keinginan mereka untuk mengeksplorasi, mengembangkan, dan memanfaatkan pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat (Harmadi dkk. 2022; Hasbi, Fitri, dan Mukhtar 2023; Tavares dkk. 2023). Studi ini menyimpulkan bahwa standar isi dan

kompetensi untuk lulusan bersifat adaptif. Kriteria ini dapat berkembang untuk memenuhi tujuan pendidikan yang berubah atau untuk mengatasi peningkatan yang diperlukan dalam sistem pendidikan. Singkatnya, prinsip-prinsip dasar yang membimbing tujuan standar pendidikan nasional telah didefinisikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022. Peraturan ini bertujuan untuk selaras dengan filosofi Pancasila dan untuk memfasilitasi reformasi pendidikan yang mengintegrasikan gagasan filosofis ke dalam tujuan dan pendekatan pembelajaran negara.

2. Asumsi Filosofis dan Tujuan Pendidikan di Indonesia

Tujuan pembelajaran menguraikan kemampuan dan pengetahuan yang diharapkan diperoleh siswa, sejalan dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadi mereka. Perumusan tujuan pendidikan ini dibentuk oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip panduan masyarakat (Rusman 2023; Normile 2023). Di Indonesia, tujuan pendidikan selaras dengan tujuan pendidikan nasional, yang dipengaruhi oleh filosofi Pancasila, menawarkan sudut pandang yang

husus tentang masyarakat, bangsa, dan pemerintah (Andriani, Maryani, dan Affandi 2023; Supriyono dkk. 2023). Ideologi Pancasila memainkan peran penting dalam menetapkan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana ditekankan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini juga mencerminkan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Perkembangan dan hasil tujuan pendidikan nasional sangat dipengaruhi oleh filosofi ini. Hal ini membentuk lintasan pendidikan dan menjadi dasar pengembangan kurikulum. Berbagai elemen, termasuk wawasan tentang dunia fisik, pengaruh budaya, perilaku masyarakat, individu, dan teori pendidikan, disesuaikan untuk memandu peningkatan kurikulum berdasarkan asumsi filosofis (Duc Dat, Van Bien, dan Kraus 2023). Kebutuhan akan dimensi dalam tujuan pendidikan nasional inti, tujuan unit pendidikan, dan hasil pembelajaran muncul dari elemen-elemen ini (Anggraena dkk. 2022). Penetapan tujuan pendidikan nasional secara jelas dan halus mengintegrasikan nilai-nilai yang tertanam dalam filosofi Pancasila.

Landasan etika Pancasila berasal dari nilai-nilai budaya Indonesia yang terhormat. Prinsip-prinsip ini diungkapkan dan tersirat melalui lima bagian Pancasila. Filosofi, dasar, dan ideologi nasional Pancasila harus secara aktif ditunjukkan dan diamati dengan cara yang terencana, sistematis, dan kohesif di semua aspek bangsa, yang meliputi pejabat pemerintah dan warga negara Indonesia (Prasetya dkk. 2022; Prasetya dkk. 2023). Pancasila harus dimanfaatkan sebagai kerangka kerja untuk hubungan sosial antar warga negara Indonesia dan sebagai panduan etika bagi masyarakat, sejalan dengan Pembukaan Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, baik pemerintah maupun setiap warga negara harus secara konsisten bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Cita-cita Pancasila membentuk landasan filosofis bangsa dan sangat penting dalam membentuk karakter nasional (Khoirina dkk. 2022; Sakban dan Sundawa 2023). Hal ini akan membantu menumbuhkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang dibangun di atas Pancasila.

Penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila dalam strategi pembangunan nasional yang memengaruhi semua komponen masyarakat, serta dalam legislasi yang berlaku untuk seluruh bangsa. Dalam konteks ini, cita-cita Pancasila berfungsi sebagai inti dan struktur untuk merumuskan tujuan dan rencana pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Pendidikan di Indonesia secara signifikan dibentuk oleh lima prinsip dasar Pancasila. Sila pertama, *"Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,"* menggarisbawahi pentingnya keyakinan spiritual dan pengakuan akan otoritas tertinggi. Meskipun Indonesia adalah negara sekuler, pendidikan agama merupakan komponen utama kurikulum, yang bertujuan untuk menanamkan landasan etika dan moral yang kuat pada siswa. Oleh karena itu, berbagai mata pelajaran mendorong pemahaman dan apresiasi terhadap berbagai sudut pandang keagamaan. Sila kedua, *"Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,"* menekankan pentingnya memperlakukan orang lain dengan adil, bermartabat, dan hormat. Prinsip

ini memengaruhi kurikulum dengan mendukung nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kesetaraan sosial. Siswa belajar menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi hak-hak individu tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, atau etnis. Para pendidik didorong untuk mengintegrasikan nilai-nilai seperti empati, kebaikan, dan rasa hormat ke dalam metode pengajaran mereka. Lebih lanjut, prinsip ini meningkatkan kemampuan berpikir kritis, yang memungkinkan siswa untuk membuat keputusan yang terinformasi yang mendukung masyarakat yang adil dan penuh kasih sayang. Sila ketiga, *"Persatuan Indonesia,"* berfokus pada kohesi sosial dan identitas nasional. Ide ini diwujudkan dalam pendidikan melalui kurikulum yang dirancang untuk menumbuhkan patriotisme dan rasa kebersamaan nasional di kalangan siswa. Mata pelajaran utama seperti Bahasa Indonesia dan sejarah mendorong apresiasi mendalam terhadap budaya, nilai-nilai, dan tradisi bangsa. Kurikulum ini juga menyoroti pentingnya keragaman dengan mengakui berbagai kelompok etnis dan budaya di negara ini dan menumbuhkan rasa hormat dan toleransi terhadap pandangan budaya

yang berbeda. Dalam mempromosikan persatuan, prinsip ini berkontribusi pada stabilitas dan keberhasilan bangsa secara keseluruhan. Sila keempat, *“Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan,”* menyoroti dedikasi Indonesia terhadap nilai-nilai demokrasi dan pengambilan keputusan melalui diskusi dan representasi. Kurikulum ini mengadvokasi cita-cita demokrasi, seperti pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan masyarakat, yang berfokus pada proses demokrasi, kerangka hukum, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan (Annava dkk. 2023; Tuhuteru, 2023). Terakhir, sila kelima, *“Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia,”* menekankan upaya mewujudkan keadilan sosial untuk menjamin perlakuan yang adil dan kesejahteraan bagi setiap warga negara. Prinsip ini memengaruhi kurikulum dengan membahas topik-topik yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan sosial, bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar dapat berkontribusi pada masyarakat yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan

(Riyanti dkk. 2023; Supriyono dkk. 2023).

Mengingat manfaat-manfaat tersebut, jelas bahwa filsafat bukan sekadar kumpulan pernyataan, tetapi dapat memengaruhi aspirasi pendidikan dan hasil yang diharapkan untuk mencapai aspirasi tersebut. Ketika membahas keuntungan dari tujuan pendidikan, pada dasarnya hal itu mencakup penguraian beragam keterampilan yang diharapkan dikembangkan oleh siswa, selaras dengan nilai-nilai dan keyakinan mereka. Sistem kepercayaan atau filsafat yang dianut oleh suatu masyarakat terkait erat dengan bagaimana tujuan pendidikan didefinisikan. Dalam konteks ini, tujuan pendidikan selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini berakar pada pandangan dunia masyarakat Indonesia sebagai konstituen masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana diwujudkan dalam Pancasila. Mengakui hubungan ini sangat penting agar lintasan dan fondasi pendidikan di Indonesia selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, pendidikan nasional berlandaskan pada Pancasila dan Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini menunjukkan cita-cita filosofis Pancasila yang memiliki arti penting bagi rakyat Indonesia. Tujuan pendidikan nasional meliputi pemb_培养 kemampuan siswa untuk menjadi individu yang beriman dan mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa; menunjukkan karakter yang baik; sehat, berpengetahuan, terampil, kreatif, dan mandiri, serta berkembang menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis. Lebih jauh lagi, tujuannya adalah untuk menumbuhkan kemampuan dan mengembangkan karakter serta budaya nasional yang terhormat. Melalui penjelasan dan arahan filosofi Pancasila, beserta rumusan dan konsekuensinya, jelas bahwa target pendidikan nasional yang dipandu oleh filosofi Pancasila dapat berhasil berkontribusi dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dari waktu ke waktu.

3. Implikasi Pancasila sebagai Landasan Filosofis dalam Kurikulum Indonesia

Sebagai landasan filosofis bangsa, Pancasila secara signifikan

membentuk sistem pendidikan di Indonesia. Dampaknya pada kurikulum menciptakan landasan yang kokoh bagi kerangka pendidikan di negara ini. Hal ini karena Pancasila, sebagai filosofi dasar, menggabungkan berbagai elemen seperti tujuan, prinsip, dan target pendidikan (Syahidi dkk. 2023). Selain itu, pengintegrasian Pancasila ke dalam kurikulum bertujuan untuk membina generasi Indonesia yang sadar akan identitas nasionalnya, mendorong toleransi, dan mewujudkan karakteristik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila (Husaeni 2023). Akibatnya, dampak Pancasila pada kurikulum menunjukkan dedikasi Indonesia untuk membina lulusan yang tidak hanya berpengetahuan tetapi juga bertanggung jawab, beretika baik, dan peka terhadap keberagaman dan cita-cita nasional. Ini meletakkan landasan penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Pada dasarnya, Pancasila terdiri dari nilai-nilai moral yang berakar pada warisan budaya Indonesia yang terhormat, yang terangkum dalam lima prinsipnya, yang sangat penting untuk membentuk karakter bangsa dan

mencapai keadilan serta kemakmuran (Khatimah 2023).

Pancasila, sebagai landasan filosofis pendidikan, memiliki implikasi yang mendalam bagi kerangka pendidikan nasional. Setidaknya ada empat komponen fundamental yang perlu diteliti:

a. Pendidikan karakter dan moral:

Dalam perjalanan pendidikan, Pancasila berperan sebagai inti untuk mengembangkan karakter dan nilai-nilai moral. Prinsip-prinsip seperti kerja sama masyarakat, kesetaraan sosial, pemerintahan demokratis, dan persatuan nasional ditekankan dalam menumbuhkan karakter siswa. Pancasila menanamkan prinsip-prinsip moral yang vital dalam bangsa, seperti kejujuran, disiplin, kerja keras, dan integritas (Nur dkk. 2023). Selain itu, pendidikan yang berpusat pada Pancasila meningkatkan kesadaran moral dan etika, mendorong kaum muda untuk mengadopsi perilaku dan pendekatan positif dalam kehidupan sehari-hari mereka (Hariyadi dkk. 2023; Riyanti dkk. 2023).

b. Meningkatkan toleransi: Fungsi Pancasila sebagai landasan filosofis dalam kurikulum juga mendorong apresiasi terhadap keragaman budaya, agama, dan etnis. Strategi ini bertujuan untuk mempromosikan pemahaman, penerimaan, dan solidaritas di antara berbagai kelompok masyarakat (Pratiwi, Triyanto, dan Gunawati 2023). Pendidikan berbasis Pancasila sangat penting untuk menumbuhkan karakter bangsa Indonesia, karena karakter yang kuat menjadi landasan masyarakat yang damai dan sejahtera. Riyanti, Haris, dan Nurmala (2023) berpendapat bahwa pendidikan Pancasila dapat menumbuhkan toleransi, apresiasi terhadap keragaman, dan komitmen terhadap persatuan, yang semuanya sangat penting untuk menjaga perdamaian di lingkungan multikultural Indonesia.

c. Pendidikan Kewarganegaraan: Pancasila menekankan nilai keragaman dan keterlibatan aktif dalam urusan masyarakat. Kurikulum nasional memasukkan pendidikan kewarganegaraan untuk mempersiapkan individu

yang memahami hak dan kewajibannya. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan mengintegrasikan Pancasila sebagai mata pelajaran dalam program pendidikan. Melalui mata pelajaran ini, siswa mengeksplorasi nilai-nilai Pancasila dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan mereka. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler dan inisiatif keterlibatan siswa, yang merupakan bagian dari kurikulum Merdeka, semakin memperkuat nilai-nilai ini (Chamisijatin dkk. 2023; Fauzan dkk. 2023).

- d. Pembelajaran inklusif: Pancasila menekankan pendekatan komprehensif terhadap pendidikan, menjamin bahwa semua kelompok dalam masyarakat dapat mengakses kesempatan belajar. Hal ini terlihat jelas dalam kurikulum, yang memenuhi beragam kebutuhan peserta didik (Japar dkk. 2023). Contoh strategi inklusif ini adalah Kurikulum Merdeka, yang memprioritaskan pembelajaran personal. Pembelajaran personal memodifikasi pendidikan

berdasarkan kesiapan siswa, metode belajar yang disukai, dan minat, serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan mereka. Selain itu, variasi dalam penyampaian pendidikan, isi yang disajikan, dan hasil yang dihasilkan dapat membantu mencapai “profil siswa Pancasila,” sebuah aspek penting dalam penerapan Kurikulum Merdeka (Meinur, Yunita, dan Gunawan 2023). Melakukan asesmen formatif dini sangat penting dalam pembelajaran personal, memungkinkan pendidik untuk mengukur kesiapan dan kecenderungan siswa sehingga mereka dapat menerapkan strategi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu.

Singkatnya, Pancasila berperan sebagai kerangka filosofis dasar dalam sistem pendidikan Indonesia, memengaruhi berbagai elemen kurikulum untuk menumbuhkan pengembangan karakter, penerimaan, kewarganegaraan, dan pendidikan inklusif. Upaya-upaya ini memungkinkan Pancasila untuk berperan dalam pertumbuhan komprehensif siswa dan pembentukan masyarakat yang

berakar pada prinsip-prinsip dasarnya.

D. Kesimpulan

Filsafat sangat penting dalam membentuk tujuan pendidikan dan desain kurikulum di Indonesia. Filsafat berkontribusi pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan kurikulum dengan memasukkan wawasan tentang lingkungan, budaya, masyarakat, individu, dan teori pendidikan. Kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, pengembangan karakter, dan keterlibatan warga negara, serta mengilustrasikan prinsip "Bhineka Tunggal Ika" untuk menyoroti kekayaan keragaman budaya, etnis, dan agama di Indonesia.

Tolok ukur pendidikan nasional sangat penting untuk memasukkan konsep filosofis ke dalam kurikulum dan untuk mengevaluasi kualitas pendidikan. Tolok ukur ini, yang membahas isi pendidikan, proses, keterampilan lulusan yang diinginkan, tenaga pengajar, fasilitas, administrasi, pendanaan, dan evaluasi, menentukan kerangka sistem pendidikan Indonesia. Dipengaruhi oleh globalisasi, faktor

politik, dan kebutuhan pembangunan, tolok ukur ini berupaya memastikan bahwa aspirasi pendidikan selaras dengan tujuan nasional berdasarkan filosofi Pancasila, yang mewujudkan nilai-nilai fundamental masyarakat Indonesia.

Kebijakan-kebijakan terkini, khususnya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, No. 13 Tahun 2015, dan Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2021, menyoroti peningkatan penekanan pada konten dan standar kompetensi lulusan dalam kurikulum nasional. Meskipun standar kompetensi lulusan, yang menilai sikap, pengetahuan, dan kemampuan peserta didik, sebagian besar tetap konsisten, standar tersebut tetap vital untuk mengevaluasi hasil pendidikan.

Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis inti, memberikan dasar yang kokoh bagi pendidikan di Indonesia dan mengarahkan tujuan pembelajaran serta pengembangan nilai. Tujuan Pancasila meliputi pemb 培养 generasi penerus Indonesia yang tidak hanya berpengetahuan tetapi juga menunjukkan karakter yang kuat, kesadaran sosial, dan apresiasi terhadap keragaman dan nilai-nilai nasional. Kurikulum ini berfokus pada empat elemen kunci: pendidikan

karakter, pertumbuhan moral dan etika, pendidikan kewarganegaraan, dan pembelajaran inklusif. Elemen-elemen ini berlandaskan nilai-nilai seperti kerja sama, kesetaraan sosial, demokrasi, dan solidaritas nasional, yang mendorong pemahaman etika dan perilaku bertanggung jawab di kalangan siswa.

Pendidikan kewarganegaraan, yang berbasis pada Pancasila, merupakan komponen kunci kurikulum nasional dan mendorong siswa untuk terlibat dengan isu-isu yang berkaitan dengan keragaman dan keterlibatan masyarakat. Selain itu, pembelajaran inklusif dipupuk melalui berbagai strategi pengajaran yang disesuaikan dengan kesiapan, minat, dan metode belajar yang disukai siswa. Namun, studi ini terutama berfokus pada dua standar spesifik: standar isi dan standar kompetensi lulusan, dan menganalisis evolusinya dalam kaitannya dengan kerangka filosofis Pancasila. Investigasi di masa mendatang harus mengeksplorasi standar pendidikan tambahan, termasuk standar proses, standar penilaian, persyaratan staf pengajar, fasilitas, tata kelola, dan pendanaan, untuk memberikan

perspektif yang komprehensif tentang sistem pendidikan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyono, A. F., Rahmat, N. A., & Munawarroh, N. (2022). Skills of Islamic Religious Education Teachers in Class Management. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 6(1), 104-115. <https://doi.org/10.35723/ajie.v6i1.229>.
- Ahmed, Md. M. et al. (2022). Ensuring Learner Centred Pedagogy in an Open and Distance Learning Environment by Applying Scaffolding and Positive Reinforcement. *Asian Association of Open Universities Journal*, 17(3), 289-304.
- Arifin, Z. (2019). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ayudia, I. et al. (2023). *Pengembangan Kurikulum Sumatera Utara*. Sumatera Utara: PT. Mifandi Mandiri Digital. <https://doi.org/10.31219/osf.io/qyc5f>. 410
- Balogun, B. J. (2023). Building an Authentic African Philosophy of Education Based on the African Concept of Personhood. *Curriculum Perspectives*. 43(1) 151–164. <https://doi.org/10.1007/s41297-023-00187-x>.
- Beribe, M. F. B. (2023). The Impact of Globalization on Content and Subjects in the Curriculum in Madrasah Ibtidaiyah: Challenges and Opportunities. *At-Tasyrih Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 9(1), 54–68. <http://dx.doi.org/10.55849/attasyrih.v9i1.157>.

- Cates, K. A. (2022). Global Education as a Cross-Curricular Approach to Language Teaching for Democracy. *Iranian Journal of Language Teaching Research*, 10(3), 75-96. <https://doi.org/10.30466/ijltr.2022.12122>.
- Chamisijatin, L. et al. (2023). The Implementation of Projects for Strengthening the Profile of Pancasila Students in the Implementation of the Independent Learning Curriculum. *Journal of Community Service and Empowerment*, 4(1), 38-48. <https://doi.org/10.22219/jcse.v4i1.24679>.
- Dai, Y. et al. (2023). Collaborative Construction of Artificial Intelligence Curriculum in Primary Schools. *Journal of Engineering Education*, 112(1), 23-42. <https://doi.org/10.1002/jee.20503>.
- Farrokhnia, M. et al. (2022). Bridging the Fields of Entrepreneurship and Education: the Role of Philosophical Perspectives in Fostering Opportunity Identification. *The International Journal of Management Education*, 20(2), 100632. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2022.100632>.
- Igwe, P. A. et al. (2022). Pedagogical Approaches to Responsible Entrepreneurship Education. *Sustainability*, 14 (15), 9440. <https://doi.org/10.3390/su14159440>.
- Juanda, A. (2022). *Landasan Kurikulum dan Pembelajaran: Berorientasi Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013*. Cirebon: CV. Confident.
- Khatimah, H. (2023). Implikasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1(3), 88-96. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7982342>.
- Kioupi, V., & Voulvoulis, N. (2022). The Contribution of Higher Education to Sustainability: The Development and Assessment of Sustainability Competences in a University Case Study. *Education Sciences*, 12(6), 406. <https://doi.org/10.3390/educsci12060406>.
- Law, M. Y. (2022). A Review of Curriculum Change and Innovation for Higher Education. *Journal of Education and Training Studies*, 10(2), 16. <https://doi.org/10.11114/jets.v10i2.5448>.
- Majewska, I. A. (2023). Teaching Global Competence: Challenges and Opportunities. *College Teaching*, 71(2), 112-124. <https://doi.org/10.1080/87567555.2022.2027858>.
- Ornstein, A. C. & Hunkins, H. P. (2018). *Curriculum Foundations, Principles, and Issues*. 4th ed. Allyn and Bacon. New Jersey: Prentice Hall.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005

- tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Prasetya, R. A. et al. (2023). Strategy for the Development of the Pancasila Ideology in Indonesia during the 1945–1966. *Journal of Survey in Fisheries Sciences*, 10(4), 1817–1838. <https://doi.org/10.17762/sfs.v10i4S.1408>.
- Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Kemendikbud. (2019). *Penguatan Pembelajaran Nilai dan Moral Pancasila*. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan.
- Rusman. (2023). *Landasan Filosofis. Kajian Mata Kuliah Kebijakan Pengembangan Kurikulum*. Depok: Rajawali Press.
- Sadiyah, H. & Wiranegara, D. A. (2023). Pancasila Values in the Book of Al-Arabiyyah Lil Hayah as Arabic Learning Materials. *JP (Jurnal Pendidikan): Teori dan Praktik* 8(23), 86–94. <https://doi.org/10.26740/jp.v8n2.p86-94>.
- Tim Pengembangan MKDP. (2018). *Kurikulum and Pembelajaran*. Depok: Rajawali Pers.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wilson, C. D. et al. (2023). Using Automated Analysis to Assess Middle School Students' Competence With Scientific Argumentation. *Journal of Research in Science Teaching* 61(1), 38–69 <https://doi.org/10.1002/tea.21864>.